

Politik Kekerabatan dan Praktik Klientelistik Keluarga Jayabaya di Lebak dan Keluarga Iskandar di Kabupaten Tangerang

Muhammad Syamsul Hidayat (1), Sri Budi Eko Wardani (2)

(1) Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jl.Margonda Raya, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia

(2) Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jl.Margonda Raya, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia

Email Korespondensi: sandy.tirta@gmail.com ; probosugiyanto@gmail.com

Abstrak: Persaingan perebutan kekuasaan di Provinsi Banten dipenuhi oleh politik kekeluargaan atau dinasti. Survivalitas keluarga Jayabaya dan keluarga Iskandar di tengah proliferasi dan dominasi keluarga Ratu Atut belum banyak diteliti oleh para ilmuwan sejauh ini. Penulis menggunakan metode kualitatif berdasarkan wawancara dan literatur terkait. Adapun teori yang digunakan adalah klientelisme dari Aspinall dan Berenschot (2019) untuk membandingkan hakikat jejaring, pola kontrol, hakikat sumber daya dan derajat intensitas kedua daerah tersebut. Hasilnya (1) Alasan dari kemampuan keluarga Jayabaya dan Iskandar mempertahankan kekuasaannya selama 20 tahun selain karena alasan ketokohan juga karena keduanya menggunakan praktik klientelisme yakni pertukaran sumber-sumber daya material atau manfaat dengan dukungan politik, (2) praktik klientelisme yang dilakukan oleh keluarga Jayabaya menggunakan jejaring informal ormas Jarum sedangkan keluarga Iskandar menggunakan jejaring formal birokrat dan partai politik bersama dengan pengusaha, (3) keluarga Jayabaya cenderung menggunakan sumber daya publik dalam pertukaran klientelistik sedangkan keluarga Iskandar cenderung lebih banyak menggunakan sumber daya privat yang bersumber pada bisnis properti dan hubungan kerjasama dengan pengusaha, dan (4) diskresi partai politik pada dominasi keluarga Jayabaya lebih rendah dan cenderung pada sumber daya patronase yang bersifat publik dibanding dengan keluarga Iskandar

Kata kunci; Banten; Dinasti Jayabaya; Dinasti Iskandar; Klientelisme; Patronase.

Abstract: *political kinship and dynasty dominate power competition in Banten Province. The survival of the Jayabaya family and Iskandar family in the midst of the proliferation of the Ratu Atut family has not been widely studied by scientists. The research method used is qualitative based on interviews related literature. The theory used is clientelism from Aspinall and Berenschot (2019) to compare the nature of patronage networks, pattern of control, resources and intensity of two regions. The results is (1) The ability of the Jayabaya and Iskandar families to maintain their power for 20 years was not only for reasons of character, but also clientelistic exchange by allocating state resources and benefits for political support, (2) clientelism practice of the Jayabaya family uses the informal network of the Jarum organization, while the Iskandar family uses a formal network of bureaucrats, political parties and businessmen, (3) Jayabaya family tends to use public resources in clientelistic exchanges, while the Iskandar family tends to use more private resources sourced from property and cooperative relationships with businessmen, and (4) the discretion of political parties in the Jayabaya family's power is lower and tends to patronage resources that are public compared to the Iskandar family.*

Keywords: Banten; Jayabaya Dynasty; Iskandar Dynasty; Clientelism; Patronage.

Informasi Artikel: Disubmit: 2022-02-26; Direvisi 2022-03-26; Disetujui: 2022-04-12

PENDAHULUAN

Fenomena kehadiran politik dinasti dan kekerabatan di aras lokal dalam lanskap paradoks konsolidasi dan perkembangan demokrasi di Indonesia merujuk pada data yang dirilis oleh Kemendagri terbukti cukup meluas. Pada akhir tahun 2013 terdapat 57 kepala daerah yang melakukan praktik politik dinasti. Senada dengan itu, riset Nagara Institute tahun 2020 menunjukkan 5 provinsi dengan calon kepala daerah yang terhubung dengan politik dinasti terbanyak, yakni Sulawesi Selatan (13 calon), Sulawesi Utara (11 calon), Jawa Tengah (11 calon), Jawa Timur (8 calon), dan Banten (8 calon). Hubungan antara keluarga dengan kekuasaan sulit untuk dipisahkan



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

satu sama lain. Dalam pendekatan sosiologis, sejak awal kekuasaan didasarkan pada garis keturunan para raja bahkan sampai era modern aktor-aktor selalu melibatkan keluarga atau kerabatnya dalam dunia politik (Surbakti 1992). Literatur terkait politik kekerabatan di Indonesia banyak dilakukan oleh para ilmuwan dengan istilah dan pendekatan yang beragam seperti politik dinasti (*political dynasty*), politik keluarga (*political family*) dan politik kekerabatan (*political kinship*). Adapun istilah yang paling banyak digunakan adalah politik dinasti untuk menunjukkan pergantian kekuasaan berdasarkan keturunan atau strategi menjaga kekuasaan dengan cara mewariskan kekuasaan kepada kalangan sanak keluarga (Djati 2015). Meskipun demikian banyak literatur seringkali tidak memberi batasan definisi terhadap istilah yang digunakan (Haboddin 2017; Patmawati and Sukmawati 2018).

Politik dinasti dan politik kekerabatan di Provinsi Banten pada dasarnya sudah banyak dilakukan oleh sejumlah ilmuwan politik (Effendi 2018; Hamid 2010, 2014; Handoyo 2018; Kenawas 2014; Leo Agustino 2010; Sukri 2020; Sutisna 2017a). Umumnya berfokus pada politik dinasti keluarga Tb. Chasan Sochib atau Haji Hasan (ayah Ratu Atut Chosiyah). Misalnya menganalisis latar belakang Haji Hasan sebagai jawara Banten (Hamid 2010) dengan sumber daya finansial, sarana koersif, tradisi patronase dan kontrol terhadap partai politik (Kenawas 2014). Persepektif lainnya menganalisis terkait perspektif desentralisasi dimana otonomi daerah justru yang memberi ruang familisme untuk mengorganisasikan diri menjadi dinasti politik (Effendi, 2018).

Sejak Ratu Atut Chosiyah menjabat sebagai gubernur Banten tahun 2004, dinasti politik menurut Sutisna (2017) mengalami perluasan (proliferasi) baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Meski demikian, selain keluarga Ratu Atut juga terdapat kekuatan politik lainnya di Banten yang berdasarkan pada kekerabatan seperti keluarga Jayabaya di Lebak, keluarga Aat Syafaat di Cilegon, keluarga Dimiyati di Pandeglang, dan keluarga Iskandar di Kabupaten Tangerang. Berbeda dengan keluarga Dimiyati dan Aat Syafaat, keluarga Jayabaya dan Iskandar mampu bertahan ditengah proliferasi keluarga Ratu Atut selama hampir 20 tahun. Pada kasus pilkada Kabupaten Lebak, keluarga Ratu Atut sempat terlibat untuk mendukung salah satu pasangan calon yaitu Amir Hamzah dan Kasmin dengan tujuan mengalahkan keluarga Jayabaya yang saat itu diwakili Iti Octavia. Sebagaimana di Kabupaten Lebak, keluarga Ratu Atut juga pernah berupaya untuk menguasai Kabupaten Tangerang dengan mencalonkan Istri dari Wawan yaitu Airin Rachmi Diany pada pilkada tahun 2008. Hasilnya baik di Kabupaten Lebak maupun Kabupaten Tangerang, keluarga Ratu Atut gagal meraih kekuasaan.

Studi terkait keluarga-keluarga kecil tersebut masih belum banyak dilakukan terutama kemampuan mereka untuk bertahan di tengah dominasi keluarga Ratu Atut. Analisis atas keluarga-keluarga kecil tersebut menjadi penting untuk menjelaskan klaim proliferasi dari keluarga Ratu Atut di Banten. Selain itu, pada umumnya literatur menjelaskan rendahnya partisipasi politik masyarakat Banten sebagai sebab bertahannya dominasi keluarga Ratu Atut (Sukri 2020) tetapi tidak cukup mampu menunjukkan kausalitasnya karena pada saat yang sama praktik politik dinasti dan kekerabatan juga dapat menjadi faktor rendahnya partisipasi politik masyarakat. Literatur lain terkait keluarga Jayabaya dan Iskandar cukup minim diantaranya berkisar pada faktor personalia atau jawara (Asshegaf 2013) dan pragmatisme partai dan ketiadaan opisisi (khodijah, 2020). Di sisi lain, secara teoritis dominasi politik dinasti atau politik kekeluargaan biasanya terjadi karena jejaring patronase yang sudah lama terbentuk (Hamid 2014; Sutisna 2017c, 2017b).

Literatur yang ada biasanya menganalisis politik dinasti dan politik kekerabatan dari perspektif kultural dan sejarah masa lalu dan menganggap tidak adanya kemauan dari masyarakat untuk melakukan perubahan. Analisa tersebut mengesampingkan pola struktural dimana konsentrasi kekuasaan oleh segelintir atau sekelompok orang (keluarga, klan, dll) berpotensi menghambat ruang publik, menghambat pengawasan dan pendisiplinan yang efektif atas elit politik-bisnis. Hal itu juga menunjukkan adanya hubungan erat antara kekuasaan yang terkonsentrasi dengan praktik klientelistik. Sedangkan sejauh ini klientelisme seringkali dianalisa berdasarkan “perspektif biaya” yang mengadopsi pendekatan pilihan rasional dan individualis seperti faktor rendahnya pembangunan (Bustikova and Corduneanu-Huci 2011; Kitschelt and Kselman 2013; Kitschelt and Wilkinson 2007; Remmer 2007) atau karena kecenderungan pemilih miskin unutup menerima dan menanggapi uang atau insentif klientelistik (Stokes et al. 2013). Berdasarkan uraian diatas penelitian ini berusaha untuk menjelaskan fenomena politik dinasti atau politik kekerabatan di Banten dengan membandingkan praktik klientelisme yang dilakukan oleh keluarga Iskandar dan keluarga Jayabaya dalam mempertahankan kekuasaannya di tengah proliferasi dan dominasi keluarga Ratu Atut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun studi komparatif termasuk dalam jenis penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab akibat, yakni memilih faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lain (Surakhmad, 1986:84). Metode penelitian kualitatif dimaksudkan untuk menyajikan gambaran yang spesifik mengenai situasi, penataan sosial atau hubungan (Neuman 2006:44). Dalam hal ini peneliti akan membandingkan dua kasus politik kekerabatan di



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Lebak yaitu keluarga Jayabaya dan di Tangerang yaitu keluarga Iskandar berdasarkan satu teori pembanding yaitu teori klientelisme. Dimensi yang diperbandingkan diantaranya adalah hakikat jejaring, pola kontrol diskresi, hakikat sumber daya dan derajat intensitas klientelisme di kedua keluarga tersebut (Aspinall and Barendschot 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Kekerabatan di Banten

Istilah politik keluarga dan politik kekerabatan adalah sama yaitu merujuk pada aktor politik yang memiliki ikatan pertalian atau hubungan kerabat dengan mantan pejabat politik sebelumnya dan rentang waktu minimal dua generasi (Casey 2008). Sedangkan politik dinasti menurut Hess (1966) merupakan keluarga yang memiliki setidaknya empat anggota, dengan nama yang sama, terpilih sebagai pejabat resmi. Adapun menurut Yasushi Asako (2010), politik dinasti terjadi apabila satu anggota keluarga menduduki jabatan politik yang sebelumnya dijabat oleh kerabatnya. Pembatasan definisi berdasarkan pengertian di atas menunjukkan perbedaan dimensi waktu dan jumlah. Keluarga dari pejabat politik sebelumnya dalam rentang waktu minimal dua periode kekuasaan dan terdiri dari minimal dua generasi disebut dengan politik kekerabatan sedangkan politik dinasti merujuk pada empat kerabat yang sama pada jabatan resmi (Hess, 1966) atau bahkan terdiri dari empat generasi (Dal Bo, Dal Bo, and Snyder 2007).

Keluarga Ratu Atut, keluarga Jayabaya maupun keluarga Iskandar pada dasarnya belum mencapai empat generasi oleh karenanya tidak relevan menggunakan istilah politik dinasti. Meski demikian strategi mempertahankan kekuasaan mereka didasarkan pada jejaring kekerabatan yang tersebar di sejumlah posisi politik sehingga lebih tepat menggunakan istilah politik kekerabatan. Sejak awal dinamika politik Banten memang tidak bisa dilepaskan dari peran jawara atau *local strongmen* dan politik kekerabatan. Peran jawara memang sangat kuat terutama karena bermula dari peranannya dalam proses pembentukan provinsi Banten (Hamid 2010). Menurut Abdul Hamid jawara yang melibatkan diri dalam perpolitikan di Banten adalah jawara pengusaha yang dibesarkan oleh rezim Orde Baru dengan membentuk organisasi Satuan Karya (Satkar) Jawara tahun 1971 dan Chasan Sochib merupakan pemimpinnya. Chasan Sochib kemudian tampil dominan dalam pembentukan Provinsi Banten dan menempatkan anaknya, Ratu Atut sebagai wakil gubernur pada pemilihan tahun 2001.

Proses konsolidasi dan penguatan bangunan politik kekerabatan telah berlangsung ketika kerabat Ratu Atut masuk dalam politik seperti asosiasi bisnis terutama Kamar Dagang dan Industri (Kadin), partai politik (dalam hal ini Partai Golkar), organisasi keagamaan, organisasi pemuda, organisasi olahraga, organisasi pendekar, hingga organisasi sosial-budaya (Sutisna, 2017:110). Dimulai dengan suaminya Ratu Atut, Hikmat Tomet yang menjadi anggota DPR RI tahun 2019, istri Chasan Sochib yakni Heryani menjadi Wakil Bupati Pandeglang tahun 2011 kemudian adik Ratu Atut, Tb. Chaeri Wardana atau Wawan menggantikan ayahnya menjadi ketua Kadin (2000-2012) pada tahun 2012 dan Ratu Tatu menjadi Bupati Serang tahun 2016. Sedangkan adik tiri Ratu Atut, Tubagus Haerul Jaman menjadi Walikota Serang dua periode sejak tahun 2011. Anak Pertama Ratu Atut, Andika Hazrumy menjadi Wakil Gubernur Banten (2017-2022) dan istrinya Adde Rosi Khoerunnisa terpilih sebagai DPR RI (2019-2024), Anak keduanya, Andhiara Aprilia Hikmat menjadi anggota DPD RI (2014-Sekarang) dan suaminya Tanto Warsono Arban (Wakil Bupati Pandeglang 2016-Sekarang). Bahkan = Menantunya, Airin Rachmy Diany juga menempati posisi Wali Kota Tangerang Selatan (2011-2021) yang kemudian diteruskan oleh Pilar Saga Ichsan anak dari Ratu Tatu.

Mosca dalam Dal Bo, et al. (2007) mengatakan bahwa setiap kelas menampilkan kecenderungan untuk menjadi turun temurun, terutama ketika posisi politik yang terbuka untuk semua. Model politik dinasti di Indonesia menurut Koordinator Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah ada tiga. Pertama model arisan, dimana kekuasaan hanya menggumpal pada satu atau keluarga, dan berjalan secara regenerasi. Kedua, dinasti politik lintas kamar dengan cabang kekuasaan. Misalnya kakak jadi bupati, adik jadi ketua DPRD, anggota keluarga memegang posisi strategis. Ketiga, model lintas daerah misalnya daerah yang berbeda namun masih dipimpin oleh satu keluarga yang sama. Adapun kekuatan politik dinasti atau politik kekerabatan Ratu Atut di Banten merupakan model ketiga atau lintas daerah yang berpusat pada partai Golkar di sejumlah daerah seperti Kota Tangerang Selatan, Pandeglang, Kabupaten Serang dan Kota Serang.

Pada kasus Kabupaten Lebak, upaya keluarga Atut dalam hal ini melalui adik kandungnya yaitu Tubagus Chaeri Wardana atau Wawan yang mendukung pasangan Amir Hamzah dan Kasmin untuk melawan Iti Octavia pada pilkada 2013 justru berujung pada penangkapan dirinya setelah Akil Mochtar menjadi tersangka dalam kasus penyuapan sengketa Pilkada Kabupaten Lebak. Akil Mochtar yang saat itu merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi terbukti menerima suap untuk memenangkan pasangan Amir Hamzah dan Kasmin dalam sengketa. Sebagaimana di Kabupaten Lebak, keluarga Ratu Atut juga pernah berupaya untuk menguasai Kabupaten Tangerang dengan mencalonkan Istri dari Wawan yaitu Airin Rachmi Diany pada pilkada tahun 2008. Namun



pasangan Jazuli Juwaini dan Airin Rachmi hanya mendapatkan 38,45% dari total suara dan kalah dari pasangan Ismet Iskandar (petahana) dan Rano Karno yang berhasil memperoleh jumlah suara mutlak, sebesar 57% suara.

Berdasarkan uraian di atas, perluasan, persebaran dan pertumbuhan (proliferasi) dari politik dinasti atau kekerabatan Chasan Sohib atau Ratu Atut di Banten tidak berjalan cukup lancar tetapi mendapatkan perlawanan di beberapa daerah terutama Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Menariknya perlawanan di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Tangerang justru merupakan perlawanan yang juga menggunakan politik dinasti atau kekerabatan. Meskipun model politik kekerabatan keluarga Jayabaya di Lebak dan Iskandar di Kabupaten Tangerang bukan lintas daerah sebagaimana keluarga Ratu Atut namun kekuatan kedua keluarga di daerah tersebut cukup untuk bertahan di tengah dominasi keluarga Ratu Atut.

Politik Kekerabatan dan Klientelistik Keluarga Jayabaya di Kabupaten Lebak

Literatur klientelisme politik pada umumnya memandang bahwa pembangunan ekonomi (sebagian besar didefinisikan dengan pendapatan per kapita) berperan dalam melemahkan dan membatasi praktik klientelisme. Misalnya argumen tersebut didasarkan pada riset bahwa negara-negara miskin lebih cenderung menjadi klientelistik (Bustikova and Corduneanu-Huci 2011; Kitschelt and Kselman 2013; Kitschelt and Wilkinson 2007; Remmer 2007) atau memilih miskin lebih mungkin menerima dan memberikan balasan terhadap uang atau intensif klientelistik lainnya (Brusco, Nazareno, and Stokes 2004; Stokes et al. 2013). Berdasarkan Tabel 1. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kabupaten Lebak adalah yang terendah dibanding daerah lainnya.

Tabel 1. PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Banten

Kabupaten/Kota PDRB	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Cilegon	195731	209059	224690	238196	237880	250327
Kota Tangerang	65043	69632	73839	78047	75897	78628
Kabupaten Serang	41003	44125	47633	51095	47133	48832
Kota Tangerang Selatan	38461	41328	44239	49345	60996	64337
Kota Serang	36724	39683	42757	45977	45847	47327
Kabupaten Tangerang	31458	33194	35158	37974	41966	44089
Kabupaten Pandeglang	18442	20065	21657	22919	22380	23125
Kabupaten Lebak	17572	19009	20530	22097	21013	21781

Berdasarkan tabel di atas dan asumsi sementara literatur klientelisme maka praktik klientelisme di Kabupaten Lebak adalah yang tertinggi di Banten. Meskipun demikian statistik tersebut tidak dapat menjadi indikator akurat dalam menentukan derajat klientelisme karena tidak menunjukkan mengapa dan bagaimana perkembangan ekonomi melemahkan dan membatasi praktik-praktik klientelistik. Praktik klientelisme di dunia kontemporer yang terkait dengan sejarah masa lalu pembentukan institusi-institusi negara (Aspinall dan Berenschot, 2019:39-40). Adapun pioner keluarga Jayabaya adalah Mulyadi Jayabaya yang menjadi Bupati Lebak dua periode (2003-2013). Pada tahun 2003 Mulyadi Jayabaya terpilih menjadi Bupati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak. Selanjutnya UU No. 23 tahun 2004 mengharuskan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, bukan DPRD. Bersamaan dengan UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum maka Kabupaten Lebak secara resmi dan pertama kali melaksanakan pilkada langsung pada tahun 2008.

Mulyadi Jayabaya yang merupakan petahana mencalonkan diri pada pilkada 2008 berpasangan dengan Amir Hamzah. Mulyadi Jayabaya yang merupakan petahana awalnya mendapat sorotan publik setelah dugaan ijazah palsu dan dinilai cacat hukum. Menurut studi Siti Khodijah (2021) pada pemilu 2008, Mulyadi Jayabaya mendapatkan dukungan penuh dari para jawara di Lebak karena sebelumnya sudah menjalin hubungan politik sejak periode pertama. Kedekatan dengan jawara menjadi modal lain yang tidak dimiliki oleh lawan politiknya saat itu. Selain itu Mulyadi Jayabaya juga adalah jawara dan merupakan orang kuat lokal (Alwi and Erowati 2019; Susanti 2020). Meskipun didukung oleh mayoritas partai politik, kekuatan utama atau mesin politik Mulyadi Jayabaya justru adalah para jawara yang berperan sebagai *mobilized political participation* (Alamsyah 2010). Jawara selain sebagai broker juga berubah peran pada saat pemilu kepala daerah langsung dilaksanakan tahun 2008 yakni bukan hanya berperan sebagai mobilisasi politik tetapi juga broker politik. Abdul Hamid (2011) bahkan menyebut perubahan tersebut terjadi pada peranan kyai di Banten dari *cultural broker* menjadi *political broker*.

Dimensi **pertama** dalam studi komparatif klientelistik menurut Aspinall dan Berenschot (2019) adalah hakikat jejaring yang dipergunakan untuk mendistribusikan sumber daya patronase. Pada kasus di Kabupaten



Lebak, jawara yang awalnya menjadi mesin politik Mulyadi Jayabaya bertransformasi menjadi sebuah ormas yang disebut Jarum atau Jaringan Relawan Untuk Memenangkan (kemudian berubah menjadi Jaringan Relawan Untuk Masyarakat). Jarum awalnya bertujuan untuk memenangkan adiknya Mulyadi yaitu H. Sumantri Jayabaya pada pilkada 2013. Namun menurut salah satu timses dan relawan Iti Octavia, Nunung Hidayat Gebek atau biasa dipanggil dengan Abah Nunung, “karena ada permasalahan dan hasil musyawarah keluarga maka calon yang diusung berubah jadi ibu Iti Octavia” (Wawancara Langsung, 2020). Narasumber tidak menjelaskan terkait permasalahan yang dimaksud apakah kasus penganiayaan terhadap Budi Basuki, Asep Supriadi dan Erwin (Dami 2013) atau masalah lainnya. Namun menurutnya ormas Jarum sendiri dipimpin langsung oleh keluarga Jayabaya. Hal tersebut senada dengan gambaran Aspinall dan Berenschot (2019:144) dimana struktur broker yang dipraktekan di Indonesia umumnya mengandalkan relasi keluarga dan jejaring pribadi lainnya, serta para kepala wilayah kantor, pemimpin organisasi dan para lidere lainnya. Narasumber lainnya yaitu Agus R. Wisas, Ketua Timses Iti Octavia, juga mengaku sebagai bagian dari keluarga Jayabaya dimana istrinya adalah adik dari Jayabaya.

Dimensi pertama juga menyangkut analisis jangkauan jejaring dilihat berdasarkan derajat institusionalisasi dan sifat dari ikatannya. Keberadaan organisasi Jarum yang melibatkan seluruh unsur pendukung keluarga Jayabaya dapat dipandang sangat terinstitusionalisasi. Hal ini diakui baik oleh Abah Nunung maupun Agus bahwa menurut mereka banyak birokrat atau aparatur pemerintah daerah yang tergabung dalam ormas Jarum. Dibawah kepemimpinan Iti Octavia sebagai bupati Lebak, organisasi Jarum semakin menguat dan tidak hanya memenangkan Iti Octavia yang merupakan anak dari Mulyadi Jayabaya pada tahun 2013 tetapi juga pada pilkada 2018. Iti Octavia Jayabaya memerlukan Mulyadi Jayabaya dalam menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh partai dan rakyat kendati memiliki akses ke partai, birokrasi maupun kepada masyarakat. Hal tersebut diakui oleh tokoh-tokoh partai di daerah (Alwi and Erowati 2019) bahwa Dalam upaya untuk memenangkan pasangan Iti Oktavia, Bupati Jayabaya menggerakkan mesin kekuasaannya dengan melibatkan pejabat struktur dan jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Humardani 2020).

Adapun peranan organisasi masyarakat (ormas) Jarum dalam kemenangan keluarga Jayabaya cukup besar bahkan lebih besar dari peran partai politik terutama dalam kegiatan kampanye. Hal ini diakui oleh Abah Nunung dan Agus, menurut keduanya relawan berperan paling besar saat kemenangan. Relawan mengadakan sejumlah kegiatan dengan melibatkan tokoh masyarakat, memberikan santunan dan hadiah saat sosialisasi seperti kalender, gelas, payung, dan lain-lain. Sebagaimana menurut Abah Nunung, “Kegiatan kami bergerak di bidang sosial, jadi ketika JARUM bergerak maka masyarakat sudah mengetahui. JARUM seringkali melaksanakan kegiatan sosial seperti sunatan massal dan lainnya” (Wawancara Langsung, 2020). Jejaring ormas Jarum tidak hanya kepala desa tetapi juga anggota dewan misalnya Aad Firdaus yang terpilih menjadi anggota DPRD 2019-2024 merupakan anggota aktif ormas Jarum.

Dimensi perbandingan praktik klientelistik **kedua** adalah pola kontrol terhadap sumber-sumber daya dan manfaat yang disediakan oleh negara. Agar klientelisme bisa berjalan, menurut Aspinall dan Barendschot (201:45) seorang politisi harus mampu memilih untuk memberikan balas budi kepada sebuah kampung yang masyarakatnya telah memilihnya. Tujuan utama partai politik adalah kontrol terhadap sumber daya negara atau dalam hal ini daerah baik untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan partai itu sendiri. Namun dalam kasus tertentu menurut Aspinall dan Barendschot (2019), partai politik di Indonesia juga harus bersaing dengan jejaring informal non-partai. di Lebak dimana partai politik mesti bersaing dengan organisasi non-partai seperti Jarum. Menurut salah seorang pengamat dengan ini sial AS menyatakan bahwa sejak awal, “Semua itu yang *ngatur* Jayabaya, termasuk beberapa politisi maupun pejabat-pejabat fungsional di Kabupaten Lebak itu seperti KPU atau lembaga lain didukung Jayabaya. Yang saya tahu Jayabaya itu kelihatannya emang menguasai dua partai (PDI-P dan Demokrat) tapi orang-orang di Partai lain juga orangnya Jayabaya, setidaknya pasti punya koneksi dengan Jayabaya” (Wawancara Langsung).

AS menolak untuk memberitahukan namanya karena dirinya juga pernah dibantu oleh jejaring keluarga Jayabaya untuk mendapatkan salah satu jabatan politik strategis tetapi saat ini dirinya mengaku sudah tidak berhubungan dengan keluarga Jaya lagi karena menurutnya hal tersebut tidak sesuai dengan etika politik. Mirip dengan pernyataan AS, Abah Nunung dalam konteks lain juga juga memberikan keterangan serupa bahwa biasanya orang yang ingin ikut kontestasi politik di organisasi seperti HMI, KNPI, dan dan yang lainnya sering datang meminta bantuan keluarga Jayabaya dan beberapa diantara mereka melalui ormas Jarum agar dapat mengakses dukungan dari keluarga inti Jayabaya,

Dalam kasus kontrol jejaring klientelistik keluarga Jayabaya di Kabupaten Lebak, organisasi masyarakat Jarum mengontrol alokasi dan distribusi sumber-sumber daya patronase seperti anggaran, program dan manfaat pemerintah berupa kesejahteraan, dana pembangunan dan kontrak kerja dengan tersentralisasi. Alokasi tersebut diberikan kepada relawan dan masyarakat. Misalnya menurut Agus, “kami merawat seperti keluarga, bukan timses. Misalnya ketika sakit kita jenguk, ketika ada kelebihan rezeki kita berikan”. Relawan yang membantu dalam pemilu senantiasa diberikan perlakuan istimewa atau *privilege* baik dalam program kesehatan maupun



kesejahteraan. Relawan yang tergabung dalam organisasi Jarum juga dilibatkan dalam sejumlah agenda dengan masyarakat seperti bakti sosial, dana bantuan sosial dan yang lainnya. Jarum juga terlibat dalam sosialisasi pemerintah daerah terhadap masyarakat dengan sejumlah agenda kerjasama. Misalnya dalam program rumah tidak layak huni (RTLH), Jarum ikut serta memangun tujuh unit RTLH di tiga kecamatan, yakni: Cibadak, Gunung Kencana, dan Warunggunung. Berdasarkan keterangan Abah Nunung “Kami membangun rumah mereka itu di tempat lain, berikut kandang ayam sebagai sumber nafkahnya, setelah ada kesepakatan dengan pemilik lahan,” (Trisna 2022). Contoh lainnya adalah terkait program bantuan sosial (bansos) yang ditujukan untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak langsung penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 saat pandemic covid-19. Polres Lebak Polda Banten bersama GP Ansor Lebak, Ormas Jarum dan Kumala (Keluarga Mahasiswa Lebak) menyalurkan Bansos Untuk Komunitas Ojol (ojek online) Lebak bertempat di Mapolres Lebak (Kamaludin 2021).

Selain itu, ormas Jarum juga memainkan peranan sosialisasi dan pengawasan terhadap masyarakat dengan menjadi mitra utama penguasa Kabupaten Lebak yaitu keluarga Jayabaya. Misalnya yang diakui Abah Nunung bahwa Jarum sering menyalurkan sikap LSM yang mengganggu investor sehingga menurutnya investor tidak nyaman dalam berinvestasi dan memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakatnya. Jarum biasanya menyurati bupati atau melakukan audiensi agar LSM tersebut ditindak. Contoh pengawasan juga terlihat pada kasus Galian Pasir Kuarsa di Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak. Jarum mendesak Pemerintah Provinsi Banten dan meminta pihak perusahaan menghentikan aktivitas Galian Pasir Kuarsa tersebut. Menurut Abah Nunung, perusahaan tambang pasir kuarsa milik PT. Hanasa Prima diduga belum mengantongi sejumlah izin perluasan lahan, oleh karenanya, DPP Ormas Jarum mendesak pihak Distamben Provinsi Banten untuk segera menghentikan aktivitas galian pasir kuarsa yang sudah habis izinnya sebelum diberikan IUP Operasional kembali (Ubay 2020).

Dimensi berikutnya, *ketiga*, adalah analisa terkait hakikat sumber daya yang dipertukarkan untuk mendapatkan dukungan politik. Hakikat sumber daya dianalisa berdasarkan penerima dan barang yang diberikan. Sumber daya patronase keluarga Jayabaya di arahkan kepada pemilih perorangan atau individu dan kelompok atau kolektif baik sebelum pemilihan umum maupun setelahnya. Berdasarkan keterangan Abah Nunung, pada saat pemilihan umum relawan dan tim sukses, “Melakukan *door to door*, karena cara itu yang paling efektif. Kita punya tim yang bisa sampai 100 rumah per hari. Biasanya kita silaturahmi dengan warga, menanyakan bagaimana kabar mereka, apakah mereka puas dengan kinerja Ibu (Iti Octavia) atau ada masukan dan keinginan lainnya untuk disampaikan” (Wawancara Langsung). Abah Nunung menolak untuk memberikan keterangan terkait pemberian sumber daya terhadap individu berupa uang menurutnya Jarum hanya memberikan *souvenir* atau barang kepada masyarakat ketika melakukan sosialisasi. Namun menurut SH, salah seorang warga Desa Bayah, “(kami satu keluarga) di kasih waktu itu (2018), tapi lebih kecil kalau dibandingkan tahun 2013. Saya pikir karena lawannya kotak kosong jadi isi amplopnya lebih kecil mungkin, saya juga gak begitu tahu alasannya” (Wawancara Langsung).

Adapun SH juga menjelaskan bahwa pada tahun 2013 dirinya mendapatkan amplop dari dua pasang kandidat yaitu nomor 2 (Amir Hamzah dan Kasmin) dan nomor 3 (Iti Octavia dan Ade Sumardi) namun pilihannya adalah nomor urut 3. Alasan SH saat itu memilih nomor urut 3 karena adanya sejumlah pembangunan di desa Sabah saat kepemimpinan keluarga Jayabaya. Selain itu SH juga beberapa kali bertemu dengan anggota Jarum sehingga merasa lebih dekat dengan lingkungan nomor urut 3. Namun ketika ditanya terkait kemungkinan tidak memilih nomor urut 3 apabila tidak ada amplop, SH menjawab, “saya gak tahu pasti, tapi saat itu lingkungan sekitar rumah memang dekatnya sama nomor urut 3. Saya kenal beberapa orang Jarum, beberapa kali ke rumah saya dan mereka juga suka bikin acara-acara di desa. Saya sih mikirnya biasa ya, mereka ngasih amplop gitu, tapi mungkin juga karena kita dekat” (Wawancara Langsung)

Sumber daya patronase keluarga Jayabaya yang bersifat privat sebagaimana diarahkan pada individu melalui *money politics*. Adapun sumber daya publik seringkali ditujukan pada kelompok atau anggota asosiasi terutama anak muda di desa atau kampung sebagaimana pengakuan Abah Nunung, “Kalau anak muda itu biasanya minta sarana olahraga. Paling banyak minta *dibikinin* lapangan bola, voli atau badminton”. Selain fasilitas, Jarum juga biasanya menyelenggarakan kompetisi olahraga baik secara langsung maupun sekedar membantu dalam memberi hadiah. Pertukaran terhadap kelompok menjanjikan dalam hal ini anak muda karena suara mereka juga tidak sedikit dan mereka seringkali berkelompok misalnya organisasi Karang Taruna yang ada hampir di semua desa atau kampung. Menurut Aspinall dan Barendschot (2019) pertukaran tersebut dimaksudkan untuk menggalang sejumlah suara atau memobilisasi massa. Hubungan tersebut lebih langgeng dibanding pertukaran sekali-selesai karena melampaui masa pemilihan umum, Aspinall dan Barendschot menyebutnya dengan istilah “klientelisme relasional”.

Dimensi **keempat** atau terakhir dalam studi komparatif klientelistik adalah mengukur derajat intensitas klientelistik pada kontrol diskresi partai (tinggi atau rendah) dan sumber daya yang digunakan (publik atau privat). Diskresi partai politik di kabupaten lebak dapat dikategorikan rendah dan tidak terpusat pada satu atau



dua partai utama melainkan terpusat pada keluarga Jayabaya itu sendiri dengan pelembagaan terhadap organisasi Jarum. Hal itu karena Mulyadi Jayabaya sendiri dan anaknya Hasbi Jayabaya bergabung di Partai PDI-Perjuangan sedangkan Iti Octavia bergabung dengan Partai Demokrat. Sumber daya yang digunakan dalam praktik klientelisme di Lebak oleh keluarga Jayabaya lebih banyak menggunakan sumber daya patronase publik yang diarahkan baik kepada individu maupun kelompok. Adapun sumber daya privat biasanya hanya digunakan pada saat pemilihan umum melalui praktik *money politics* akan tetapi pasca pemilihan umumnya justru lebih banyak melakukan distribusi programatik dengan sumber daya patronase publik. Lihat gambar berikut:



Gambar 1. Variasi Demokrasi Patronase Keluarga Jayabaya di Kabupaten Lebak dan keluarga Iskandar di Kabupaten Tangerang

Menurut Aspinall dan Berenschot (2019) para calon yang hendak merebut posisi jabatan politik, khususnya di cabang eksekutif, secara rutin menjanjikan hasil pembangunan yang meningkat, kualitas kinerja birokratik yang lebih baik, pelayanan kesehatan dan layanan sosial lainnya yang lebih baik dan telah ada perkembangan yang dramatis dari berbagai jenis program kesejahteraan. Hal itu sebagaimana dilakukan oleh keluarga Jayabaya di Lebak terutama dalam menjanjikan pembangunan, layanan kesehatan dan sosial serta berbagai program kesejahteraan yang dikontrol atau didistribusikan melalui pemerintah daerah dan dibantu oleh organisasi masyarakat terutama Jarum. Hal ini memudahkan Jarum pada pemilihan berikutnya untuk memaksimalkan peran dan mendapatkan dukungan dari pemilih. Bagaimanapun Jarum merupakan organisasi yang ada dibawah naungan kekuasaan keluarga Jayabaya.

Politik Kekerabatan dan Klientelistik Keluarga Iskandar di Kabupaten Tangerang

Berdasarkan tabel 1. PDRB per kapita Kabupaten Tangerang lebih besar dibanding Kabupaten Lebak bahkan dua kali lipat sejak tahun 2020. Meski demikian selain pendapatan, faktor lainnya dalam *perspektif biaya* juga adalah populasi yang mengalami urbanisasi. Penduduk pendatang Kabupaten Tangerang berdasarkan Database Pelayanan Seksi Pindah Datang Bidang Pendaftaran Penduduk pada tahun 2020 mencapai 35.375 orang. Berdasarkan asumsi *perspektif biaya* urbanisasi membuat praktik klientelistik menjadi kurang efektif. Adapun data BPS menunjukkan kemiskinan di Kabupaten Tangerang sedikit lebih rendah dibanding Kabupaten Lebak (lihat tabel 3.3). Kabupaten Tangerang merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi ketiga (7%) berdasarkan persentase setelah Kabupaten Lebak pada urutan ke dua (9%). Meskipun begitu, Kabupaten Tangerang mengalami kenaikan angka kemiskinan pada tahun 2020 sebesar 1.5% atau terdapat 48.19 ribu jiwa penduduk miskin baru. Sedangkan Kabupaten Lebak hanya naik 0.9% atau angka kemiskinan bertambah 12.9 ribu jiwa. Adapun pada tahun 2019, Kabupaten Lebak justru mengalami penurunan angka kemiskinan dari 108.81 ribu jiwa pada tahun 2018 menjadi 107.93 ribu jiwa. Sedangkan pada tahun yang sama, Kabupaten Tangerang justru mengalami kenaikan dari 190.05 ribu jiwa pada tahun 2018 menjadi 193.97 ribu jiwa.

Umumnya para ilmuwan memandang bahwa penurunan tingkat kemiskinan akan mengurangi klientelisme karena pendapatan lebih tinggi menyebabkan harga per suara menjadi lebih tinggi (Calvo dan Murillo, 2004; Dixit dan Londregan, 1996). Berdasarkan data di atas, PDRB Kabupaten Tangerang lebih tinggi dan angka kemiskinan lebih rendah dari Kabupaten Lebak. Hal itu masih sulit untuk menyimpulkan bahwa klientelisme di Kabupaten Tangerang lebih rendah dibanding Kabupaten Lebak. Selain itu berdasarkan data BPS penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Lebak lebih baik dibanding Kabupaten Tangerang meskipun secara persentase tidak lebih baik dibanding angka kemiskinan Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu sebagaimana menurut Aspinall dan Berenschot *perspektif biaya* memiliki kekurangan dalam menganalisa praktik klientelisme.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Sebagaimana sub bagian sebelumnya, dimensi **pertama** analisis hakikat jejaring keluarga Iskandar juga dimulai dengan mengidentifikasi bentuk jejaring, jangkauan dan sifat dari ikatan jejaring. Serupa dengan Mulyadi Jayabaya, Ismet Iskandar juga menyiapkan regenerasinya dengan menjadikan Ahmed Zaki Iskandar anggota DPR RI dari Partai Golkar tahun 2009-2014 dan adiknya Intan Nurul Hikmah sebagai DPRD Kabupaten Tangerang sejak tahun 2005 di Komisi C bidang anggaran dan periode keduanya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang. Namun berbeda dengan Mulyadi Jayabaya yang merupakan jawara atau orang kuat lokal (*local strongmen*) Ismet Iskandar merupakan birokrat pada masa Orde Baru.

Jejaring birokrasinya yakni Partai Golkar berguna saat pemilihan umum 2003 yang saat itu masih dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini juga menunjukkan minimnya peranan Kiyai dan Jawara di Kabupaten Tangerang dibanding dengan Kabupaten Lebak. Sama halnya dengan keluarga Mulyadi Jayabaya, Ismet Iskandar juga mempersiapkan anaknya untuk menggantikan dirinya sejak awal. Namun persiapan keduanya juga berbeda, jika Mulyadi Jayabaya mempersiapkan relawan atau jejaring Kiyai dan Jawara dalam satu wadah yaitu Jarum, Ismet Iskandar justru mempersiapkan jejaring birokrat, politisi dan pengusaha di sekelilingnya. Hal ini terlihat dari kepemimpinan Zaki Iskandar yang mampu mengkonsolidasikan birokrat, partai politik dan pengusaha di Kabupaten Tangerang. Persamaan dan perbedaan latar belakang historis kedua daerah memiliki dampak terhadap perbedaan variasi derajat intensitas klientelisme di kedua daerah.

Relawan keluarga Iskandar berubah dari mulai periode Ismet Iskandar sampai Zaki Iskandar. Pada pilkada 2018 terdapat setidaknya dua relawan Zaki Iskandar yaitu Posko Relawan Rakyat (Posraya) Indonesia dan Bersama Sahabat Zaki (Bersahaza). Posraya pada dasarnya dibentuk di sejumlah daerah di Indonesia untuk pemenangan Jokowi-Ma'ruf tahun 2019 dan salah satunya juga di Kabupaten Tangerang. Pembentukan Posraya juga tidak dapat dilepaskan dari dukungan partai Golkar terhadap Jokowi untuk melanjutkan periode keduanya. Kedekatan Posraya dengan Golkar di Kabupaten Tangerang sekaligus membuat Posraya sebagai relawan pendukung Zaki Iskandar. Dengan kata lain Posraya adalah relawan yang dibentuk oleh partai politik untuk pemenangan pemilu. Adapun relawan Bersahaza terbentuk hanya menjelang pemilihan umum tahun 2018 dan setelahnya bubar atau balas budi calon terpilih ditujukan pada individu relawan bukan organisasi relawan. Hasan Doni yang merupakan ketua organisasi relawan Bersahaza sendiri merupakan anggota partai Golkar yang mencalonkan diri sebagai DPRD Kabupaten Tangerang pada pemilu legislatif tahun 2019 namun akhirnya kalah oleh Wahyu Nugraha. Dengan demikian baik Posraya maupun Bersahaza memiliki kedekatan dengan partai politik Golkar sehingga dapat dikatakan bahwa jejaring utama keluarga Iskandar adalah partai Golkar serta birokrat yang berada di bawah kepemimpinan Ismet Iskandar dan Zaki Iskandar.

Jangkauan jejaring keluarga Iskandar selain partai politik juga komunitas dan organisasi masyarakat. Zaki Iskandar yang memiliki beragam riwayat organisasi dan cukup banyak mengikuti perkumpulan olahraga seperti menjadi Ketua Umum Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Provinsi Banten, Ketua Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Tangerang, dan anggota komite eksekutif PSSI-KPSI Pusat. Menurut Aspinall dan Barendschot (2019:1999) politisi biasanya akan berusaha menjadi ketua perkumpulan profesional atau klub olahraga, memberikan donasi ke klub olahraga atau organisasi keagamaan, atau menjadi penyokong satu sponsor untuk acara-acara kebudayaan atau perkumpulan berbasis etnis. Berbeda dengan jangkauan jejaring organisasi Jarum milik keluarga Jayabaya di Kabupaten Lebak, jangkauan jejaring keluarga Iskandar tidak cukup terinstitusionalisasi. Sejak awal Ismet Iskandar dan anaknya Zaki Iskandar mengkonsolidasikan partai-partai politik di daerahnya. Hal ini berbeda dibanding dengan keluarga Iskandar yang memfokuskan jangkauan jejaringnya pada jawara, kyai dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam organisasi Jarum.

Zaki Iskandar lebih mahir dalam mengorganisir partai-partai politik tanpa harus menyiapkan orang-orang di partai lain tetapi cukup dengan pembagian yang adil. Sebagaimana menurut Mukhlis, "menurut saya di Kabupaten Tangerang itu lebih berbagi sehingga tidak berisik. Selama memiliki kualitas dan tidak melanggar aturan, ya sah sah aja" (Wawancara Langsung). Pembagian yang adil juga menurutnya diberlakukan pada birokrasi di pemerintah Kabupaten Tangerang sehingga birokrasi cukup solid. Hal itu menjelaskan sifat dari ikatan jejaring keluarga Iskandar di Tangerang yang berdasarkan penggunaan koneksi politik sedangkan keluarga Jayabaya lebih menunjukkan kapasitas ikatan pemecah masalah. Hal ini membuat partai-partai di Kabupaten Tangerang memberikan dukungannya kepada Ahmed Zaki Iskandar karena akan diakomodir kepentingannya dan tidak diganggu ketika pemilihan legislatif di dapil masing-masing.

Adapun dimensi **kedua** terkait pola kontrol, Diskresi atau kewenangan untuk melakukan balas budi atas kemenangan keluarga Iskandar di Kabupaten Tangerang lebih banyak dilakukan oleh partai politik sebagai medium dengan pemilih atau masyarakat. Selain itu, sejak awal kemenangan Zaki Iskandar tidak ditopang oleh peran besar organisasi relawan melainkan dukungan partai politik dan pengusaha, sebagaimana menurut pengamat politik Subandi, "Faktor utama Zaki-Ombi ada pada uang. Dan uang itu diawali dari kekeluargaan. Ayah Zaki merupakan tokoh penting Tangerang yang sangat berpengaruh secara politik. Memimpin dua periode sebagai Bupati Tangerang. Banyak pejabat, pengusaha, dan tokoh Tangerang yang dibesarkan oleh Ayahnya.



Dan saat Pilkada, dikapitalisasi. Memenangkan akanknya. Melalui dukungan dan pendanaan.” (Wawancara Langsung).

Zaki Iskandar menurut Subandi tidak terlalu dekat dengan pemilih melainkan pribadi yang elitis atau anak gedongan. Oleh karenanya kemenangan Zaki Iskandar ditopang oleh mesin partai, birokrasi dan pengaruh jejaring ayahnya Ismet Iskandar. Dengan begitu kontrol sumber daya di Kabupaten Tangerang dikuasai oleh birokrat dan pengusaha. Adapun partai politik di Kabupaten Tangerang menurut Subandi “mereka hanya dapat jatah saja, setelah itu aman *gak* banyak ganggu (kepemimpinan) Zaki”. Adapun birokrat sejak awal memang merupakan jejaring keluarga Iskandar yang selama ini besar dan atau dibesarkan oleh Ismet maupun Zaki Iskandar. Sedangkan pengusaha mendapatkan kontrol sumber daya selain melalui keluarga Iskandar juga dari wakilnya yaitu Mad Romli yang menurut Subandi terkenal sebagai “Raja Limbah”, “Dia sebagai pengusaha limbah paling terkenal. Kekuatan uang menjadi penyebab mengapa orang lain tidak berani melawan. Perpaduan birokrat dan uang menjadi sesuatu yang sempurna untuk melagengkan dinasti” (Wawancara Langsung).

Sejak awal, perlawanan terhadap dinasti politik Ratu Atut di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Lebak dilakukan oleh dinasti juga akan tetapi spesifik pada kasus di Kabupaten Tangerang politik dinasti atau kekeluargaan Iskandar mendapat dukungan besar dari para pengusaha. Kolaborasi antara pengusaha dan politisi dalam hal ini partai politik sudah lama terjalin di Kabupaten Tangerang. Partai-partai politik di Tangerang juga mengontrol sumber daya patronase terutama melalui lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggaran DPRD Kabupaten Tangerang seringkali mendapat banyak perhatian misalnya untuk menyelenggarakan agenda Reses, 50 anggota DPRD Kabupaten Tangerang menghabiskan anggaran Rp1,7 Miliar. Pada tahun 2019, reses digelar selama lima hari kerja dengan anggaran sebesar Rp35 juta untuk setiap anggota dewan atau sebesar Rp1.750.000.000 untuk seluruh anggota DPRD Kabupaten Tangerang, berjumlah 50 anggota. Menurut PPTK Reses DPRD Kabupaten Tangerang Hasyim, uang sebesar Rp35 juta itu merupakan uang makan minum yang digunakan untuk 5 kali kegiatan atau Rp7 juta per satu kegiatan. Para anggota dewan wajib menyediakan makan minum untuk 140 orang konstituen dengan anggaran makan dan snack sebesar Rp50 ribu perpaket (Kirom 2019).

Dimensi komperatif **ketiga** terkait analisa terkait hakikat sumber daya yang dipertukarkan keluarga Iskandar untuk mendapatkan dukungan politik di Kabupaten Tangerang. Sumber daya patronase publik dan privat hampir secara berimbang digunakan oleh keluarga Iskandar dalam melakukan praktik klientelistik. Pertama sumber daya patronase privat didasarkan pada bisnis pribadi keluarga Iskandar yaitu properti dan wakilnya Mad Romli dalam bisnis pengelolaan limbah. Sumber daya privat tersebut biasanya digunakan sebelum pemilihan umum untuk mendapatkan dukungan partai politik dan pemilih. Sumber daya privat juga ditujukan pada pemilih baik secara individu maupun kolektif. Secara kolektif sebagaimana keluarga Jayabaya di kabupaten Lebak, Zaki Iskandar juga menggunakan sejumlah program kerja untuk memaksimalkan kampanye politiknya. Misalnya melalui program seperti Saba Desa dan Jumat Keliling yang diberikan pada individu, Zaki Iskandar melakukan transaksi atau praktik klientelisme yang bersifat berkelanjutan dengan masyarakat. Sedangkan sumberdaya publik yang diberikan pada kolektif seperti halnya pembangunan stadion ataupun dukungan dari pemerintah daerah terhadap klub sepakbola dan basket. Strategi ini sama efektifnya dengan keluarga Jayabaya yang memiliki ormas Jarum. Sebagaimana diakui oleh timses Zaki-Romli bahwa dominasi kekuasaan yang besar serta efek dari melawan kotak kosong “agak sulit untuk di kritik karena kekuasaan yang absolut dan didukung semua partai”.

Sumber daya privat juga sering digunakan untuk praktik *money politics*. Menurut Subandi, *money politics* tidak terhindarkan di setiap pemilihan umum dan tidak terkecuali di Kabupaten Tangerang. Senada dengan Subandi, KS yang merupakan warga dari kecamatan Kelapa Dua mengaku bahwa “kalau *gak* salah saya waktu itu dikasih amplop 50.000. Tapi *cuma* saya aja, istri saya *gak* dapet waktu tahun 2018 tapi waktu 2013 kita sama-sama dapet meskipun *gak* sebesar tahun 2018. Mungkin sepaket kali ya sama anak istri, saya juga *gak* tahu. Tapi kecil juga *gak* apa-apa lagian *gak* ada pilihan lain waktu 2018” (Wawancara Langsung). Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa sumber daya patronase kedua keluarga, baik Jayabaya maupun Iskandar, ditujukan pada perorangan, anggota kelompok maupun komunitas masyarakat. Meskipun strategi mereka sama namun pada praktiknya keluarga Jayabaya memiliki hubungan lebih dekat dengan masyarakat karena adanya peran ormas Jarum di setiap desa. Sedangkan keluarga Iskandar justru membuat program pemerintah untuk dapat berinteraksi dengan warganya seperti “Jumat Keliling”. Hal ini juga membuat klientelisme keluarga Jayabaya lebih panjang atau karena adanya ikatan relasional.

Sebaliknya keluarga Iskandar justru lebih dominan menggunakan strategi pertukaran sekali-selesai baik terhadap individu maupun kelompok. Hal itu karena sumber daya yang digunakan keluarga Iskandar lebih dominan berasal dari pribadi atau privat sedangkan keluarga Jayabaya sebaliknya banyak menggunakan sumber daya patronase yang bersifat publik. Meski demikian sumber daya privat yang dimiliki oleh keluarga Iskandar dan wakilnya Mad Romli juga tidak bisa dilepaskan dari kedekatannya dengan politisi dan birokrat misalnya pada bisnis properti dan bisnis pengelolaan limbah. Sebagaimana menurut Subandi, “bisnis-bisnis properti



bagaimanapun berjalan lancar karena mereka sendiri sedang berkuasa, lihat saja pembangunan di selatan dan timur. Sedangkan di bagian utara dan barat pabrik-pabrik berjamur dan disana juga merupakan basis suara Mad Romli saat kemarin pemilu 2018” (Wawancara Langsung). Subandi juga menjelaskan bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut dapat lolos dalam perizinan lingkungan jika bukan karena peran birokrasi pemerintah daerah. Kerjasama tersebut saling menguntungkan dan pada saat yang sama menjadi modal untuk pemenangan dalam kontestasi pemilu. Oleh karenanya sumber daya pribadi atau yang berasal juga pada dasarnya merupakan hasil dari proyek kerjasama dengan anggaran pemerintah daerah.

Sebagaimana pada bab sebelumnya, dimensi **terakhir** dalam studi perbandingan praktik klientelisme mengacu pada derajat klientelisme. Keluarga Jayabaya di Kabupaten Lebak dan Keluarga Iskandar di Kabupaten Tangerang sama-sama menggunakan distribusi programatik baik sebelum pemilihan umum (sebagai petahana) maupun setelah pemilihan umum untuk menjalankan praktik klientelistiknya. Diskresi partai politik di kabupaten Tangerang juga dapat dikategorikan rendah meskipun tidak lebih tinggi jika dibandingkan dengan diskresi partai di Kabupaten Lebak. Hal ini karena keluarga Iskandar tidak melemahkan kekuatan partai politik tetapi justru saling memanfaatkan. Partai politik tidak dapat menyinggung atau melawan keluarga Iskandar yang menguasai para birokrat tetapi pada saat yang sama dapat melakukan kontrol terhadap alokasi dan distribusi sumber daya negara atau patronase yang pada gilirannya menjadi sumber pendanaan partai politik dalam pemilihan umum daerah.

Diskresi partai politik di Kabupaten Tangerang tidak terinstitusionalisasi pada satu partai meskipun keluarga Iskandar berasal dari Partai Golkar namun partai lain tetap memiliki kontrol alokasi dan distribusi sumber daya negara. Alokasi sumber daya patronase, sebagaimana menurut Aspinall dan Berenschot (2019:53-54), dirancang dengan menggunakan prosedur birokratik yang terstandarisasi dalam cara-cara yang aman dari pembuatan keputusan berdasarkan diskresi oleh para pejabat publik. Hal ini yang digambarkan pada kasus alokasi dan distribusi sumber daya patronase di Kabupaten Tangerang dimana rancangan prosedur birokratik bahkan tidak hanya terjadi di pemerintahan daerah tetapi juga DPRD Kabupaten Tangerang. Hal ini terlihat dari minimnya kritik atau pengawasan dari DPRD. Sedangkan pada kasus DPRD di Kabupaten Lebak beberapa kali ditemukan pro-kontra dengan pemerintahan daerah. Hal itu karena partai politik di Lebak harus bersaing dengan aktor non-negara terutama ormas Jarum dalam mendapatkan kontrol alokasi dan distribusi sumber daya. Adapun partai politik di Kabupaten Tangerang leluasa dalam melakukan kontrol alokasi dan distribusi tersebut.

Adapun untuk sumber daya patronase yang digunakan oleh keluarga Iskandar di Kabupaten Tangerang juga banyak dari fasilitas publik. Akan tetapi sebagaimana telah diuraikan, kolaborasi antara politisi, pengusaha dan birokrat di Kabupaten Tangerang membuat sumber daya patronase juga terbagi antara publik dan privat. Para pengusaha memainkan peran cukup besar untuk mendukung program pemerintah baik sebelum pemilihan umum maupun setelahnya sehingga Gambar pada sub bab sebelumnya menunjukkan kecenderungan sumber daya patronase keluarga Iskandar ke arah kiri dibanding keluarga Jayabaya. Hal itu membuat variasi atau perbedaan antara praktik klientelistik keluarga Jayabaya di Kabupaten Lebak dan Keluarga Iskandar di Kabupaten Tangerang. Selain itu berdasarkan derajat intensitas keduanya maka proposisi keempat dari Aspinall dan Berenschot justru variasi atau perbedaan derajat klientelisme keluarga Jayabaya dan Iskandar tidak hanya karena karakter ekonomi daerah melainkan karakter politik. Dengan kata lain faktor dinamika politik antara keluarga penguasa dengan partai politik mempengaruhi variasi dari praktik klientelistik baik dalam hal diskresi atau pola kontrol maupun sumber daya patronase.

KESIMPULAN

Dominasi keluarga Jayabaya di Kabupaten Lebak dan keluarga Iskandar di Kabupaten Tangerang telah menghambat proliferasi dari kekuatan dinasti Ratu Atut Chosiyah di Banten. Alasan dari kemampuan keluarga Jayabaya dan Iskandar mempertahankan kekuasaannya selama 20 tahun dan melalui tiga kali pemilihan umum daerah bukan hanya karena alasan ketokohan Mulyadi Jayabaya dan Ismet Iskandar melainkan karena keduanya menerapkan praktik klientelisme yakni pertukaran sumber-sumber daya material atau manfaat dengan dukungan politik. Keduanya memanfaatkan kekuasaan pada periode pertama menjabat kepala daerah untuk melanggengkan kekuasaan dengan melibatkan kerabatnya dalam politik. Berbeda dengan Mulyadi Jayabaya yang mempersatukan para pendukungnya yaitu Kiyai dan Jawara dalam satu wadah yang terinstitusionalisasi dalam organisasi masyarakat Jarum untuk memenangkan anaknya Iti Octavia pada pilkada tahun 2013, Ismet Iskandar mewariskan pengaruhnya terhadap birokrat dan kerjasamanya dengan pengusaha dan partai politik kepada anaknya Ahmad Zaki Iskandar.

Konteks historis dan pemanfaatan jejaring politik yang berbeda tersebut menyebabkan variasi praktik klientelistik di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Tangerang. Berdasarkan analisis dimensi pertama komparatif yaitu hakikat jejaring menunjukan bahwa praktik klientelisme yang dilakukan oleh keluarga Jayabaya menggunakan jejaring informal yaitu ormas Jarum sedangkan keluarga Iskandar menggunakan jejaring formal yaitu birokrat dan partai politik bersama dengan pengusaha. Kemudian dimensi kedua terkait pola kontrol



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

menunjukkan hasil yang sama yakni mengarah pada pada dukungan hampir seluruh partai politik pada pemilu daerah tahun 2018. Meskipun demikian cara yang dilakukan keduanya berbeda dimana keluarga Jayabaya menekan partai lain dengan dominasi keluarganya dan keberadaan organisasi non-partai Jarum sedangkan keluarga Iskandar menjalin kerjasama dengan partai politik lain.

Analisis dimensi ketika menunjukkan variasi sumber daya patronase dimana keluarga Jayabaya dominan menggunakan sumber daya publik yang dipertukarkan melalui jejaring ormas Jarum sedangkan keluarga Iskandar cenderung lebih banyak menggunakan sumber daya privat yang bersumber pada bisnis properti keluarga Iskandar dan hubungan kerjasama dengan pengusaha terutama pada kasus Mad Romli. Variasi praktik klientelisme juga terlihat pada dimensi terakhir dimana derajat intensitas kedua keluarga dimana diskresi partai politik lebih rendah pada kasus praktik klientelisme keluarga Jayabaya dibanding dengan keluarga Iskandar. Meski demikian diskresi tersebut tidak terlalu tinggi karena jejaring Iskandar sejak awal adalah birokrat bukan partai politik, tetapi karena ketiadaan ormas seperti Jarum maka persaingan tidak terjadi dan muncul kerjasama antara birokrat, partai politik dan pengusaha. Selain itu perbedaan derajat intensitas juga terlihat pada sumber daya yang digunakan dimana keluarga Jayabaya cenderung menggunakan sumber daya publik sedangkan keluarga Iskandar justru cukup seimbang antara penggunaan sumber daya publik dan privat.

Studi komparatif atas praktik klientelistik pada penelitian ini menunjukkan empat hal, yaitu (1) politik dinasti atau kekerabatan di Indonesia pasca reformasi mempertahankan kekuasaannya melalui praktik klientelistik, (2) persepektif biaya dapat menjelaskan kemungkinan adanya praktik klientelisme namun tidak dapat menjelaskan bagaimana praktik tersebut dijalankan, (3) persektif kontrol dapat menjelaskan variasi praktik klientelistik dengan mempertimbangkan konteks historis, peran serta jangkauan dari jejaring klientelistik, dan (4) Seluruh sumber daya patronase baik yang berasal dari privat maupun publik digunakan dan diarahkan pada individu dan kelompok secara bersamaan namun dengan proses pola kontrol yang berbeda.

REFERENSI

- Alamsyah, Andi Rahman. 2010. *Islam, Jawara Dan Demokrasi, Geliat Politik Banten Pasca Orde Baru*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Alwi, Ahmad Muzaki, and Dewi Erowati. 2019. "Anomali Partai Politik (Studi Komparatif Munculnya Calon Tunggal Dalam Pilkada Kabupaten Tangerang Dan Kabupaten Lebak Tahun 2018)." *Journal of Politic and Government Studies* 9(1):81–90.
- Asako, Yasushi, T. Iida, T. Matsubayashi, and M. Ueda. 2010. *Dynastic Legislators: Theory and Evidence from Japan*.
- Aspinall, Edward, and W. Barendschot. 2019. *Democracy For Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme Dan Negara Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Asshegaf, Rifqi Zabadi. 2013. "Demokrasi Otonomi Daerah Dan Perilaku Politik Jawara (Studi Tentang Peran Jawara Dalam Pemenangan H. Mulyasi Jayabaya Dan H. Amir Hamzah Pada Pilkada Kabupaten Lebak Tahun 2008)." *Skripsi* 1–79.
- Brusco, Valeria, Marcelo Nazareno, and Susan C. Stokes. 2004. "Vote Buying in Argentina." *Latin American Research Review* 39(2). doi: 10.1353/lar.2004.0022.
- Bustikova, L., and C. Corduneanu-Huci. 2011. *Clientelism, State Capacity and Economic Development: A Cross-National Study*.
- Casey, Kimberly L. 2008. *Political Families in American Electoral Politics*. St. Louis: University of Missouri.
- Dal Bo, Ernesto, Pedro Dal Bo, and Jason Snyder. 2007. "Political Dynasties." *National Bureau of Economic Research* 76(1):2–40.
- Dami, Laurens. 2013. "Kasus Penganiayaan Oleh Adik Bupati Lebak Pengacara Korban Kecewa." *Berita Satu*. Retrieved February 25, 2022 (<https://www.beritasatu.com/nasional/134765/kasus-penganiayaan-oleh-adik-bupati-lebak-pengacara-korban-kecewa>).
- Djati, Wasisto Raharjo. 2015. "Revivalisme Kekuatan Familisme Dalam Demokrasi: Dinasti Politik Di Aras Lokal." *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 18(2). doi: 10.7454/mjs.v18i2.3726.
- Effendi, Winda Roselina. 2018. "Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti Kota Banten." *JURNAL TRIAS POLITIKA* 2(2). doi: 10.33373/jtp.v2i2.1471.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

- Haboddin, Muhtar. 2017. "Politik Keluarga Dalam Pilkada Serentak." *Jurnal Transformative* 3(2).
- Hamid, Abdul. 2010. "Memetakan Aktor Politik Lokal Banten Pasca Orde Baru." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 1(2):32–45.
- Hamid, Abdul. 2014. "A Family Matter: Political Corruption in Banten, Indonesia." *Asian Politics and Policy* 6(4):577–93. doi: 10.1111/aspp.12136.
- Handoyo, Handoyo. 2018. "Politics of A Dynasty and The Crisis of Natural Resources: Power Practices in Banten Province, Indonesia." *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan* 15(2). doi: 10.20886/jpsek.2018.15.2.107-128.
- Hess, Stephen. 1966. *America's Political Dynasties*. Routledge.
- Humardani, Larassati. 2020. "Netralitas Pegawai Negeri Sipil Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2013 Di Kabupaten Lebak, Banten." *Jurnal Communitarian* 2(2):312–30.
- Kamaludin, Abdul. 2021. "Lagi, Polres Lebak Bersama GP Ansor, Jarum Dan Kumala Salurkan Bansos Untuk Ojol Lebak Di Masa PPKM Level 4." *Parlemen Rakyat*. Retrieved March 12, 2022 (<https://parlemenrakyat.id/lagi-polres-lebak-bersama-gp-ansor-jarum-dan-kumala-salurkan-bansos-untuk-ojol-lebak-di-masa-ppkm-level-4/>).
- Kenawas, Yoes C. 2014. "The Rise of Political Dynasties in a Democratic Society." *Symposium Arryman Fellow*.
- Khodijah, Siti. 2021. "Proses Politik Pembentukan Koalisi Partai Pengusung Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018." *Tesis Ilmu Polit*.
- Kirom. 2019. "Gelar Reses, 50 Anggota DPRD Kab Tangerang Habiskan Anggaran Rp1,7 Miliar." *Merdeka.Com*. Retrieved (<https://www.merdeka.com/peristiwa/gelar-reses-50-anggota-dprd-kab-tangerang-habiskan-anggaran-rp-17-miliar.html>).
- Kitschelt, Herbert, and Daniel M. Kselman. 2013. "Economic Development, Democratic Experience, and Political Parties' Linkage Strategies." *Comparative Political Studies* 46(11). doi: 10.1177/0010414012453450.
- Kitschelt, Herbert, and Steven I. Wilkinson. 2007. *Patrons, Clients, and Policies: Patterns of Democratic Accountability and Political Competition*.
- Leo Agustino. 2010. "Dinasti Politik Pasca-Otonomi Orde Baru: Pengalaman Banten." *Prisma* 29(3).
- Neuman, W. L. 2006. *Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approach, Sixth Edition*.
- Patmawati, and Fitri Sukmawati. 2018. "Utin Cendramidi Dalam Pendirian Kerajaan Pontianak Melalui Politik Keluarga." *Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 5(1).
- Remmer, Karen L. 2007. "The Political Economy of Patronage: Expenditure Patterns in the Argentine Provinces, 1983-2003." *Journal of Politics* 69(2).
- Stokes, Susan C., Thad Dunning, Marcelo Nazareno, and Valeria Brusco. 2013. *Brokers, Voters, and Clientelism: The Puzzle of Distributive Politics*.
- Sukri, Mhd. Alfahjri. 2020. "Dinasti Politik Di Banten : Familisme , Strategi Politik Dan Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 10(2):169–90.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Susanti, Chika. 2020. "Calon Tunggal dan Orang Kuat Lokal (Studi Kasis Fenomena Calon Tunggal Dalam Pemilihan Langsung Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2018)." *Skripsi*.
- Sutisna, Agus. 2017a. "Gejala Proliferasi Dinasti Politik Di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah." *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 2(2). doi: 10.15294/jpi.v2i2.9329.
- Sutisna, Agus. 2017b. "Gejala Proliferasi Dinasti Politik Di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah." *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 2(2):100. doi:



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

10.15294/jpi.v2i2.9329.

- Sutisna, Agus. 2017c. "Jawara Banten: Local Strongman, Local Bossism Dan Fenomena Uncivilitas." *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Pemerintahan* 2, N0. 2.
- Trisna, Citra Dara Vresti. 2022. "Patut Dipuji, Ormas Jarum Bantu Bangun RTLH Di Kabupaten Lebak." *GenPI.Co*. Retrieved March 12, 2022 (<https://banten.genpi.co/hot-news/2631/patut-dipuji-ormas-jarum-bantu-bangun-rtlh-di-kabupaten-lebak?page=2>).
- Ubay. 2020. "DPP Ormas Jarum Desak Pemprov Banten Tutup Galian Pasir Kuarsa Di Cihara." *Mitrapol2*. Retrieved March 11, 2022 (<https://mitrapol.com/2020/01/29/dpp-ormas-jarum-desak-pemprov-banten-tutup-galian-pasir-kuarsa-di-cihara/>).



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.